

# 1. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar belakang

Perkembangan kota Jakarta yang pesat ternyata telah mengubah wujud kota yang maju secara ekonomi namun cenderung mundur secara ekologi. Pembangunan kota yang menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi ini sering bertentangan dengan prinsip pelestarian lingkungan, sehingga terlihat dari setiap pembangunan menyebabkan kecenderungan terjadinya penurunan kuantitas dan kualitas ruang terbuka publik, terutama ruang terbuka hijau (RTH). Semakin berkurangnya keberadaan RTH di Jakarta menurut Asiani (2007) menyebabkan kota Jakarta tidak lagi dapat memberikan kenyamanan dan kesejukan pada warganya sehingga terjadi peningkatan suhu udara, penurunan air tanah, banjir, penurunan permukaan tanah, intrusi air laut, abrasi pantai, pencemaran air berupa air minum berbau, mengandung logam berat, pencemaran udara (seperti meningkatnya kadar CO, ozon, karbondioksida, oksida-nitrogen, dan belerang), debu, suasana gersang, dan tingkat kebisingan yang tinggi.

Dalam sejarah perkembangan RTH Jakarta (Wicaksono, 2007) dijelaskan bahwa Rencana Induk Jakarta tahun 1965-1985 merupakan konsep pertama pengembangan RTH Jakarta dan merupakan karya sarjana Indonesia. Sebelumnya terdapat beberapa konsep rancangan kota Jakarta yang ditawarkan pada Soekarno saat itu, namun Soekarno memilih rancangan sarjana Indonesia yang menawarkan masterplan Jakarta hijau dengan monas sebagai sentralnya. Di dalam masterplan kota Jakarta ini telah menyebutkan bahwa masalah krusial Jakarta adalah banjir, kemacetan, perumahan, dan fasilitas kota lainnya seperti kebersihan dan masalah tanah.

Namun rencana yang sangat pro-lingkungan tersebut tidak ditindaklanjuti dalam masterplan berikutnya (Wicaksono, 2007) sehingga RTH Jakarta dari tahun ke tahun menjadi semakin berkurang. Dalam Rencana Induk Jakarta tahun 1965-1985 menyebutkan luasan RTH adalah 37,28% (241,8 km<sup>2</sup>) masih dalam kategori ideal, kemudian dalam Rencana Umum Tata Ruang Jakarta tahun 1985-2000, luasan RTH adalah 26,1-31,5% (169,65 km<sup>2</sup>) masih dalam kategori cukup ideal,

dan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta tahun 2000-2010, luasan RTH ditargetkan 13,94% (90,6 km<sup>2</sup>). Kini luasan RTH Jakarta diperkirakan 9,67% pada tahun 2006 dari total luas kota Jakarta yaitu 66.152 hektar. Luasan RTH ini relatif sangat rendah dibandingkan dengan luasan RTH yang disyaratkan bagi setiap kota di Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Penataan Ruang No.26 tahun 2007, yaitu 30% dari luas wilayah administratifnya untuk ruang terbuka hijau.

Ruang Terbuka Hijau sebagai infra struktur perkotaan yang merupakan bagian dari ruang-ruang terbuka suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi yang terbentuk guna mendukung manfaat ekologis, sosial, dan budaya yang dapat memberikan manfaat ekonomi (kesejahteraan) bagi masyarakat. Secara ekologi RTH dapat meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara, dan menurunkan temperatur kota. Bentuk-bentuk RTH perkotaan yang berfungsi ekologis antara lain sabuk hijau kota, hutan kota, taman botani maupun penghijauan (Nurisyah dalam Purnomohadi, 2006: 3).

Hutan kota adalah suatu komunitas vegetasi yang berupa pepohonan yang tumbuh di lahan perkotaan atau sekitarnya, berbentuk jalur, menyebar atau bergerombol (menumpuk) memberikan suatu struktur yang menyerupai hutan alam, dan membentuk habitat yang memungkinkan adanya kehidupan bagi satwa (Irwan, 2004: 57). Dan dijelaskan oleh Grey dan Deneke (1978) bahwa hutan kota dibangun untuk mengelola lingkungan perkotaan agar pada siang hari tidak terlalu panas sebagai akibat banyaknya bangunan. Sebaliknya pada malam hari dapat lebih hangat karena tajuk pepohonan dapat menahan radiasi balik dari bumi, sehingga hutan kota diharapkan mampu memberikan lingkungan nyaman, segar, bebas polusi, dan kebisingan untuk kesehatan warganya.

Pengembangan hutan kota di DKI Jakarta merupakan salah satu upaya untuk mengatasi masalah lingkungan di Jakarta. Pembangunan Hutan Kota diperkuat dengan adanya PP No. 63 tahun 2002 tentang Hutan Kota, dimana Pasal 3 menyebutkan bahwa fungsi hutan kota antara lain; untuk memperbaiki dan menjaga iklim mikro, meresapkan air, menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota, dan mendukung pelestarian plasma nutfah. Dengan kata

lain hutan kota adalah bagian pokok dari usaha untuk menjadikan sebuah kota menjadi tidak gersang, lebih bersih, indah, sejuk, dan tidak monoton hutan beton.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Propinsi DKI Jakarta sampai dengan tahun 2006 tercatat bahwa total hutan kota yang telah dikembangkan adalah 392,08 ha dari target pengembangan hutan kota tahun 2010 yaitu 1294,78 ha. Target perluasan hutan kota antara tahun 2000 – 2005 adalah seluas 18 hektar per tahun yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Propinsi DKI Jakarta (Susanti, 2004). Hutan kota yang telah dikembangkan tersebut terdiri dari 14 hutan kota (telah ditetapkan dengan SK Gubernur) dan 19 calon hutan kota yang tersebar di 5 wilayah Propinsi DKI Jakarta. Data hutan kota yang ada di DKI Jakarta dapat dilihat pada Lampiran 1.

Hutan Kota Srengseng merupakan salah satu hutan kota yang dikembangkan oleh Pemda Propinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pertanian dan Kehutanan berada di wilayah Kotamadya Jakarta Barat. Hutan Kota Srengseng seluas 15 hektar merupakan hutan kota yang terluas dibandingkan dengan hutan kota-hutan kota lainnya yang berada di tanah milik Pemda dan di bawah pengelolaan instansi Pemda DKI Jakarta. Fungsi utama Hutan Kota Srengseng adalah sebagai daerah resapan air dan terminal air limpasan Kali Pesangrahan. Hutan Kota Srengseng merupakan salah satu aset ekologis kota Jakarta. Menurut Suparmoko (2000: 101) untuk mengembangkan kawasan hutan diperlukan ada suatu pengelolaan dan pemanfaatan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Melalui satu program perlindungan terhadap wilayah-wilayah konservasi dapat diwujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang terpadu, sehingga tercipta pembangunan perkotaan yang berwawasan lingkungan.

Hutan kota sebagai salah satu ruang terbuka hijau kota sering dianggap bernilai ekonomi rendah sehingga cenderung diabaikan dan dialihfungsikan. Kondisi tersebut menyebabkan pembangunan dan pemeliharaan hutan kota tidak menjadi prioritas, akibatnya kondisi hutan kota yang ada tidak berkembang sebagaimana yang diharapkan. Untuk membangkitkan pembangunan RTH di wilayah Jakarta, maka perlu dihitung nilai hutan kota secara ekonomi. Dikemukakan oleh Tyrvainen, 2001 dalam Dahlan (2004), bahwa manfaat suatu hamparan hutan kota dapat diukur dan dihitung nilainya. Parameter yang dapat

diukur antara lain kesediaan membayar untuk rekreasi, sebagai penghasil kayu dan non kayu, kesejukan dan kenyamanan.

Penilaian ekonomi terhadap sumberdaya alam dan lingkungan perlu dilakukan karena adanya persaingan dengan penggunaan-penggunaan sektor ekonomis lainnya seperti mall, permukiman, kawasan CBD, dan sebagainya. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 12 ayat (3) PP No. 63 tahun 2002 menyatakan bahwa selain diperlukan kajian aspek teknis, ekologis, sosial, dan budaya setempat dalam perencanaan pembangunan hutan kota. Diperlukan juga kajian hutan kota dari aspek ekonomis. Dan implementasi dari pasal tersebut adalah melakukan penilaian ekonomi terhadap potensi sumber daya yang dimiliki oleh suatu hutan kota.

Nilai ekonomi barang dan jasa menurut Fauzi (2002: 209) dapat didefinisikan sebagai pengukuran jumlah maksimum seseorang ingin mengorbankan barang dan jasa untuk memperoleh manfaat dari barang dan jasa yang lain. Konsep ini disebut dengan keinginan membayar (*willingness to pay*) seseorang terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumber daya alam dan lingkungan. Dengan menggunakan konsep ini, maka nilai ekologis hutan kota dapat dihitung secara ekonomi dengan mengukur nilai moneter barang dan jasa. Berdasarkan pernyataan tersebut terlihat bahwa penerapan teknik penilaian manfaat dan biaya barang publik yang tidak memiliki harga pasar (konvensional) diperlukan dalam rangka mengupayakan terciptanya nilai moneter dari manfaat hutan kota. Nilai ekonomi hutan kota tersebut didapatkan setelah dihadapkan pertanyaan berapa kesanggupan membayar (*willingness to pay/WTP*) untuk tetap terpeliharanya manfaat hutan kota, atau pertanyaan tentang berapa kesanggupan menerima (*willingness to accept/WTA*) besarnya kompensasi atau hilangnya manfaat hutan kota di lingkungan tempat tinggal ( Utami, 2004).

Dengan mengetahui nilai ekonomi sumberdaya alam yang terkandung pada Hutan Kota Srengseng, diharapkan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta sebagai pengambil kebijakan dapat memberikan peluang yang sama terhadap pengembangan hutan kota sebagaimana pembangunan-pembangunan fisik kota lainnya. Peluang ini tentunya akan memberikan posisi yang seimbang antara

pembangunan fisik dan ekologi kota sehingga terwujudlah suatu ekosistem yang seimbang.

## 1.2. Rumusan Masalah

Pengembangan daerah terbangun (*build up area*) yang semakin meluas di wilayah DKI Jakarta cukup mengkhawatirkan, hal ini terlihat dari banjir yang terjadi pada tahun 2007 yang lalu. Hampir semua wilayah DKI Jakarta tertutup banjir, salah satu di antaranya wilayah yang cukup tinggi terkena banjir adalah Kotamadya Jakarta Barat. Banjir terjadi di daerah-daerah permukiman elit, dimana tanggul yang dibangun di Kali Pesangrahan tak sanggup menahan gelombang banjir yang datang. Kita ketahui bahwa banjir musiman di Jakarta akan selalu datang setiap musim hujan tiba. Sehingga salah satu alternatif yang dikembangkan untuk mencegah perluasan wilayah yang terkena banjir antara lain dengan cara memberikan perlindungan terhadap kawasan resapan air yang terletak pada kawasan penyangga ibukota Jakarta (Koestoer dan Anita, 2006). Salah satunya diantara kawasan resapan air Jakarta adalah kawasan hutan kota Srengseng.

Dari sisi lingkungan menurut Koestoer dan Anita (2006) keberadaan kawasan resapan air berdampak positif bagi kota Jakarta, namun tidak demikian dirasakan oleh komunitas di kawasan resapan, karena tidak memberikan nilai tambah ekonomi secara nyata. Sehingga apabila wilayah resapan dijual untuk kepentingan perumahan baru akibat desakan kebutuhan urbanisasi, justru akan menambah pendapatan masyarakat. Dalam perkembangan kotanya, wilayah Kotamadya Jakarta Barat sedang melakukan pengembangan pusat-pusat perdagangan dan permukiman. Berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian bagi keberadaan hutan kota Srengseng sebagai berikut :

1. Adanya kecenderungan alih fungsi lahan daerah resapan air perkotaan menjadi peruntukan lain untuk kepentingan ekonomi jangka pendek.
2. Belum adanya data yang konkrit tentang nilai ekonomi hutan kota Srengseng yang dapat dijadikan landasan dalam pembuatan kebijakan pengelolaan hutan kota.

3. Masih rendahnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dan pemerintah daerah terhadap keberadaan hutan kota sebagai suatu asset yang memiliki fungsi strategis untuk menyeimbangkan ekologi perkotaan.

### 1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada, dapat diajukan pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan keberadaan hutan kota Srengseng dalam perspektif ekonomi adalah sebagai berikut :

1. Berapa nilai ekonomi hutan kota Srengseng di tinjau dari aspek ekologis, dan sosial sebagai hasil penggunaan langsung dan tak langsung yang telah dirasakan oleh warga kota Jakarta selama ini ?
2. Berapa kemampuan membayar atau *willingness to pay* dari masyarakat dalam upaya mempertahankan keberadaan hutan kota Srengseng sebagai suatu kawasan konservasi kota Jakarta setelah dihadapkan pada mereka suatu bentuk keberadaan hutan kota serta manfaat yang akan dapat mereka rasakan di masa kini dan yang akan datang ?
3. Bagaimana perbandingan nilai ekonomi hutan kota dalam bentuk manfaat dengan nilai ekonomi hutan kota setelah dikonversikan dengan nilai lahan yang ada di sekitarnya ?

### 1.4. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menentukan nilai ekonomi hutan kota Srengseng dari aspek ekologis dan sosial sebagai hasil penggunaan langsung dan tak langsung bagi masyarakat.
2. Untuk menentukan kemampuan membayar atau *willingness to pay* dari masyarakat dalam upaya mempertahankan keberadaan hutan kota Srengseng sebagai suatu kawasan konservasi kota Jakarta. Setelah dihadapkan pada mereka suatu bentuk keberadaan hutan kota serta manfaat yang akan dapat mereka rasakan kini dan pada masa yang akan datang.

3. Untuk mengetahui keberadaan nilai aset ekologis hutan kota Srengseng setelah dilakukan perbandingan dengan nilai ekonomi hutan kota setelah dikonversikan dengan nilai lahan yang ada di sekitarnya.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pemda DKI Jakarta khususnya Dinas Pertanian dan Kehutanan sebagai pengelola dalam pengembangan hutan kota di Propinsi DKI Jakarta.
2. Dengan diketahuinya nilai ekonomi dari Hutan Kota Srengseng sebagai salah satu hutan kota yang berada di wilayah kota Jakarta, diharapkan Pemda DKI Jakarta akan tetap mempertahankan hutan kota-hutan kota yang berada di wilayah DKI Jakarta.
3. Penelitian tentang nilai ekonomi hutan kota ini diharapkan akan dapat menambah wacana baru dalam pengelolaan aset perkotaan di lingkungan akademik khususnya aset lingkungan (ruang terbuka hijau) Pemda DKI Jakarta.

### **1.5. Batasan Penelitian**

Dengan mempertimbangkan faktor kemampuan dan adanya keterbatasan waktu, maka penelitian ini dibatasi pada masalah sebagai berikut :

1. Aspek ekologi hutan kota menggambarkan fungsi ekologi hutan kota yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat antara lain sebagai penghasil O<sub>2</sub>, diperoleh dari serapan karbon yang dilakukan oleh tanaman pada saat proses fotosintesis, sebagai daerah resapan air, dan kawasan konservasi.
2. Aspek ekonomi yang dirasakan dengan kehadiran hutan kota, hutan kota produksi akan menghasilkan tanaman-tanaman yang bernilai ekonomi tinggi di masa yang akan datang, sedangkan tanaman hias, tanaman obat-obatan dan tanaman liar merupakan sumber keragaman hayati yang bernilai tinggi bagi dunia pendidikan. Ekosistem yang

tertata secara apik dan alami akan menjadikan hutan kota sebagai hutan rekreasi bagi masyarakat perkotaan.

3. Aspek sosial dari keberadaan hutan kota adalah sebagai sarana rekreasi dan interaksi bagi masyarakat.
4. Nilai ekonomi dalam penelitian ini adalah suatu perhitungan yang dilakukan terhadap unsur-unsur yang membentuk suatu hutan kota, yang dapat dilihat dari nilai penggunaan (*use value*) dan non penggunaan (*non use value*).

### **1.6. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada nilai guna dan nilai non guna dari Hutan Kota Srengseng, baik secara ekologis, sosial, dan ekonomi (identifikasi). Melalui komponen-komponen tersebut didapatkan nilai ekonomi total hutan kota Srengseng yang terdiri dari nilai kayu, nilai sewa lapak tanaman hias, nilai rekreasi, nilai serapan karbon, nilai kesejukan, nilai resapan air, nilai option/ kesediaan berkorban masyarakat dan nilai keberadaan hutan kota Srengseng.

Nilai ekonomi hutan kota Srengseng diperoleh dari nilai kesediaan membayar atau *willingness to pay* masyarakat setelah diketahuinya manfaat hutan kota sekarang maupun pada masa yang akan datang (kuantifikasi). Setelah diketahui nilai ekonomi hutan kota Srengseng, maka perlu diketahui keberadaan nilai aset ekologis yang dimiliki oleh Pemda DKI Jakarta tersebut. Untuk dapat melihat keberadaan nilai aset hutan kota Srengseng tersebut maka dilakukan perbandingan dengan nilai ekonomi hutan kota melalui konversi nilai lahan di kawasan tersebut (evaluasi). Sehingga dengan diketahuinya nilai ekonomi total hutan kota Srengseng ini, akan dapat meningkatkan fungsi dan peranan hutan kota Srengseng sebagai sebuah aset yang harus dipertahankan.



